

DAFTAR BACAAN

- Buku
Atmosudiro, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Basuki, Sunaryo. *Hukum Tanah Nasional Landasan Hukum Penguasaan Dan Penggunaan Tanah*, (Diktat Mata Kuliah Hukum Agraria, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2002/2003).

D, Soedjono. *Segi-segi Hukum Tata Bina Kota di Indonesia*. Bandung, Karya Nusantara, 1983.

Dinas Tata Kota DKI Jakarta. Informasi Ketatakotaan. Jakarta.

Harsono, Boedi. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta, Djambatan, 2006.

Harsono, Boedi. *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional*. Jakarta, Universitas Trisakti, 2002.

Hutagalung, Arie S. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyediaan dan Penyiapan Tanah Transmigrasi*. Karya Ilmiah, Universitas Indonesia, Jakarta, 1982.

Hutagalung, Arie S. *Serbaaneka Masalah Tanah Dalam Kegiatan Ekonomi (Suatu kumpulan karangan)*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.

Hutagalung, Arie S. *Condominium Dan Permasalahannya*, Jakarta:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Hutagalung, Arie S. *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Penerbit Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia (LPHI), Jakarta, Agustus, 2005.

I, M Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. PT. Bina Aksara Jakarta, 1988.

P, Ismani H. *Pokok-Pokok Sosiologi Perkotaan*. Malang, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 1991.

Pamudji, S, *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 1995.

Reksodiprojo, Sukanto dan Sudarmo, Indriyo Gito. *Management Produksi*. Yogyakarta, Edisi Ketiga, BPFE, 1984.

Soehino. *Perkembangan Pemerintah Di Daerah*. Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980.

Soemitro dan Hanitijo, Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.

Spell, Mr. NM. dan Berge, Mr. Ten. Disunting oleh Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Perizinan*. Utrech Dech, 1991.

Sujamto. *Otonomi Daerah*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.

Sumardjono, Maria S.W. dan Samosir, Martin. *Hukum Pertanahan dalam Berbagai Aspek*. Medan, Bina Medika, 2000.

Sumardjono, Maria S.W. *Kebijaksanaan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Kompas, Jakarta, Juni 2001.

Thalieb, Sajuti. *Hubungan Tanah Adat dengan Hukum Agraria Minangkabau*. Jakarta, Bina Aksara, 1985.

Tjokroamidjojo, Bintoro. *Perencanaan Tata Ruang Kota*. Ghalia Indonesia, 1990.

Toha, Miftah. *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Rajawali Pers, Jakarta, 1984.

- Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (LN 1960-104;TLN Nomor 2043); Tentang Ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA); Aneka Ilmu, Semarang.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 Nomor 159;TLN Nomor 4459); Tentang Wakaf.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (LN Tahun 1999 Nomor 60;TLN Nomor 3839); Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 93;TLN Nomor 4744); Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 Nomor 68;TLN Nomor 4725);
Tentang Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 Nomor 21;TLN Nomor 5103);
Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 (LN 1997-50;TLN Nomor 3696). Tentang
Pendaftaran Tanah.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 (LD Tahun 2012 Nomor 1;TLD Nomor 30) Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 1994
tentang Tata Cara Perolehan Tanah bagi Perusahaan dalam Rangka Penanaman Modal.

Instruksi Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999
Tanggal 19 April 1999 tentang Percepatan Pelayanan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah.

Surat Keputusan Gubernur No. Da. 11/3/11/1972 tanggal 2 februari 1972, Tentang
Penyempurnaan Prosedur Permohonan Izin Pembebasan Dan Penunjukan Penggunaan Tanah
serta Prosedur Pembebasan Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya Untuk
Kepentingan Dinas/Swasta di Wilayah DKI Jakarta.

Surat Keputusan Gubernur No. 540 Tahun 1990 tanggal 31 Maret 1990, Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemberian Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lahan/Lokasi atas Bidang
Tanah untuk Pembangunan Fisik Kota DKI Jakarta.

Surat Keputusan Gubernur No. 640 Tahun 1992 tanggal 18 April 1992, Tentang Ketentuan
Terhadap Pembebasan Lahan/Lokasi Tanpa Izin Gubernur DKI Jakarta.